

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Solopos

Wilayah Berita: Provinsi Jawa Tengah

Halaman 23

Investasi Domestik Jateng Tertinggi

Realisasi penanaman modal dalam negeri Jawa Tengah triwulan I tahun 2018 sebesar Rp 10,3 triliun menjadi yang tertinggi di Indonesia. Sektor konstruksi menjadi penyumbang terbanyak.

SEMARANG, KOMPAS — Realisasi penanaman modal dalam negeri di Jawa Tengah pada triwulan I-2018 mencapai Rp 10,3 triliun dan menjadi yang tertinggi di Indonesia. Investasi dipacu sejumlah proyek infrastruktur, termasuk jalan tol.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng Prasetyo Ariwibowo mengatakan, realisasi investasi Jateng triwulan I-2018 mencapai Rp 16,11 triliun dengan total 560 proyek. Dari jumlah itu, Rp 5,9 triliun di antaranya berupa penanaman modal asing (PMA) dan Rp 10,3 triliun berupa PMDN.

"Jika dibandingkan dengan target nilai investasi 2018 sebesar Rp 47,2 triliun, pada triwulan I telah tercapai 34,17 persen," kata Prasetyo, di Kota Semarang, Senin (30/4/2018) malam.

Prasetyo mengatakan, Pemprov Jateng terus memacu realisasi investasi antara lain dengan

mengidentifikasi masalah melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Dengan demikian, sejumlah aspek penghambat investasi bisa teratasi.

Prasetyo menjelaskan, realisasi PMDN Jateng triwulan I-2018 menjadi yang tertinggi di Indonesia antara lain karena adanya pembangunan tol, termasuk Tol Batang-Semarang. Adapun untuk PMA, Jateng di urutan kelima setelah Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Riau.

Sektor konstruksi menyumbang nilai investasi tertinggi PMDN Jateng triwulan I-2018, senilai sekitar Rp 7 triliun dengan 15 proyek dan menyerap 2.866 tenaga kerja. Untuk PMA, penyumbang terbesar adalah listrik, gas, dan air sekitar Rp 5,3 triliun.

Maksimalkan KIK

Sementara itu, di Kawasan Industri Kendal (KIK) yang dires-

mikan pada 2016, kini sudah terdapat 40 investor PMA dan PMDN. "Namun, pemerintah masih belum menyediakan air baku. Kami segera upayakan masalah ini teratasi agar realisasi investasi di KIK dapat lebih optimal," ucap Prasetyo.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal DPMPTSP Jateng Didik Subiyantoro menambahkan, fasilitas di luar kawasan industri memang tanggung jawab pemerintah. "Namun, pasokan air baku masih sulit terwujud karena banyak dana yang dibutuhkan pemerintah. Akan kami upayakan," kata Didik.

Berbagai masalah, lanjut Didik, akan diatasi lewat Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang dibentuk sesuai Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Pedoman Pelaksanaannya. Satgas, antara lain, untuk mengawal investor agar tak

kesulitan di lapangan.

Sejumlah persoalan, menurut Didik, antara lain, kesulitan lahan dan problem tenaga kerja dengan kompetensi sesuai. Masalah lain yang bisa menghambat adalah lahan industri di dekat garis pantai yang terkikis air laut.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Semarang Arnaz Agung mengatakan, pelayanan investasi pemerintah sudah semakin baik, khususnya 2-3 tahun terakhir. Hal itu terutama berkat pelayanan satu atap yang memudahkan perizinan dan menekan kemungkinan pungli.

"Hubungan dengan pemerintah membaik. Semakin sedikit pengusaha komplain. Sebenarnya bagi pengusaha, indikatornya adalah ada sinergi pemerintah dan pengusaha dalam membangun daerah. Kuncinya ada di pemimpin daerah dan ini membaik karena ada transparansi di era Presiden Joko Widodo," kata Arnaz. (DIT)